



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARUM FEBRIANI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
3. NHK : 998565

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.400.700.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/189 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 268.000.000

- MOTOR, HONDA BEAT AT/NC11B1C Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
- MOBIL, HONDA WRV E-CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 126.900.000

Sub Total Rp. 2.834.600.000

III. HUTANG Rp. 604.759.448

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.229.840.552

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.